



WALIKOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.07/2013;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan

Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013;

33. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Alokasi Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 26);
34. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-437-2013 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2013;
35. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 903-736-2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Sawahlunto Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
36. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1);
37. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Sumbur (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 6 Seri E.3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 18);
41. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan

- Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
 43. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
 44. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);
 45. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Se Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4);
 46. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 14) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2);
 47. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15);
 48. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pernyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16);
 49. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17);
 50. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19),

sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5);

51. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2);
53. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bumi Sawahlunto Mandiri (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
54. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
55. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6);
56. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13);
57. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3);
58. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 9);
59. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8);

60. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
61. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
62. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 457.683.140.090,00,- bertambah sejumlah Rp. 48.135.777.848,00,- sehingga menjadi Rp. 505.818.917.938,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 401.351.243.321,00,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 36.183.628.601,00,-Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 437.534.871.922,00,-
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 442.950.140.090,00,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 52.137.777.848,00,-Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 495.087.917.938,00,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp.(57.553.046.016,00,-)
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 56.331.896.769,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.952.149.247,00,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 68.284.046.016,00,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 14.733.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.002.000.000,00,-)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 10.731.000.000,00,-
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 57.553.046.016,00,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan
(SILPA) Rp. 0,00,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula Rp. 39.155.302.500,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (160.157.226,00,-)
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan
Rp. 38.995.145.274,00,-
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula Rp. 347.814.665.771,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.187.732.277,00,-
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan
Rp. 351.002.398.048,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- 1) Semula Rp. 14.381.275.050,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 33.156.053.550,00,-
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan
Rp. 47.537.328.600,00,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hasil Pajak Daerah
- 1) Semula Rp. 2.815.950.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 71.320.000,00,-
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 2.887.270.000,00,-
- b. Hasil Retribusi Daerah
- 1) Semula Rp. 2.416.016.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 592.718.000,00,-
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 3.008.734.000,00,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 1) Semula Rp. 8.590.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (271.678.292,00,-)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan Rp. 8.318.321.708,00,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- 1) Semula Rp. 25.333.336.500,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (552.516.934,00,-)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan
Rp. 24.780.819.566,00,-
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 21.110.045.771,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 3.187.732.277,00,-</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | Rp.24.297.778.048,00,- |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 296.397.490.000,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00,-</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | Rp.296.397.490.000,00,- |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 30.307.130.000,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00,-</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | Rp. 30.307.130.000,00,- |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.517.000.000,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.017.000.000,00,-</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan | Rp. 3.534.000.000,00,- |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 11.864.275.050,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (935.409.050,00,-)</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | Rp.10.928.866.000,00,- |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 31.421.831.000,00,-</u> |
| Jumlah dana penyesuaian otonomi setelah Perubahan | Rp. 31.421.831.000,00,- |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.652.631.600,00,-</u> |
| Jumlah dana penyesuaian otonomi setelah Perubahan | Rp. 1.652.631.600,00,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 234.523.897.652,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 30.468.423.880,00,-</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | Rp.264.992.321.532,00,- |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 208.426.242.438,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 21.669.353.968,00,-</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | Rp.230.095.596.406,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 201.551.591.814,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 28.056.866.530,00,-</u> |

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp.229.608.458.344,00,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 1.225.000.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 1.225.000.000,00,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 250.000.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 250.000.000,00,-

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 13.165.824.500,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.513.375.550,00,-)

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 11.652.448.950,00,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 300.000.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 300.000.000,00,-

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 11.513.500.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.241.764.400,00,-

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 13.755.264.400,00,-

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 4.017.981.338,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (16.831.500,00,-)

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan
Rp. 4.001.149.838,00,-

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 2.500.000.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.700.000.000,00,-

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 4.200.000.000,00,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 36.143.095.653,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.713.825.927,00,-

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp.39.856.921.580,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 99.924.757.360,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.876.279.540,00,-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan
Rp.111.801.036.900,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 72.358.389.425,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.079.248.501,00,-

Jumlah belanja Modal setelah Perubahan Rp.78.437.637.926,00,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 56.331.896.769,00,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.952.149.247,00,-
 - Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp.68.284.046.016,00,-
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 14.733.000.000,00,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.002.000.000,00,-)
 - Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp.10.731.000.000,00,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran
 - 1) Semula Rp. 45.927.760.865,00,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (77.165.867,93,-)
 - Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp.45.850.594.997,07,-
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
 - 1) Semula Rp. 10.404.135.904,00,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.029.315.114,93,-
 - Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp.22.433.451.018,93,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp. 0,00,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-
 - Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00,-
 - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
 - 1) Semula Rp. 14.733.000.000,00,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.002.000.000,00),-
 - Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp.10.731.000.000,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto terhadap Perubahan APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2013 dengan Prioritas Pembangunan Nasional;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto terhadap Perubahan APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2013 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Memanfaatkan uang kertas yang tersedia.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 23 September 2013

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 23 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ZOHIRIN SAYUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013 NOMOR 14